RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

TAHUN 2015 - 2019

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
Gedung 1 BPPT LT. 6, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta10340
Telp.+62 21 22392589. Fax. +62 21 22392589
Email: deputi2_sdaj@maritim.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
NOMOR : 36/ DII/ MARITIM/ IX/ 2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
TAHUN 2015-2019

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBERDAYA ALAM DAN JASA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menentukan arah kebijakan, perumusan program dan kegiatan, meningkatkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Surat Keputusan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor SKEP. 4/ SESMENKO/MARITIM/VIII/ 2015, perlu disusun Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa sebagai perencanaan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa untuk periode lima tahunan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);
8. Keputusan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : SKEP.4/ SESMENKO/MARITIM/VIII/ 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA TAHUN 2015-2019.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Deputi SDAJ, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
Gedung 1 BPPT LT. 6, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta10340
Telp.+62 21 22392589. Fax. +62 21 22392589
Email: deputi2_sdaj@maritim.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
NOMOR : / DII/ MARITIM/ IX/ 2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA
TAHUN 2015-2019

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBERDAYA ALAM DAN JASA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menentukan arah kebijakan, perumusan program dan kegiatan, meningkatkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Surat Keputusan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor SKEP. 4/ SESMENKO/MARITIM/VIII/ 2015, perlu disusun Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa sebagai perencanaan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa untuk periode lima tahunan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);
8. Keputusan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : SKEP.4/ SESMENKO/MARITIM/VIII/ 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA TAHUN 2015-2019.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Deputi SDAJ, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Renstra Deputi SDAJ sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah dokumen perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Keputusan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor SKEP.4/ SESMENKO/MARITIM/VIII/ 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019.

KETIGA : Renstra Deputi SDAJ menjadi pedoman dalam :

a. Menentukan arah kebijakan bidang koordinasi sumber daya alam dan jasa;
b. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa;
c. Penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon II lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa;
d. Penyusunan Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa setiap tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 9 September 2016

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA,

AGUNG KUSWANDONO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015 – 2019 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019 ini merupakan dokumen perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yang disusun selaras dengan RPJMN Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019. Renstra ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam periode lima tahun, beserta arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai rencana yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019 tentunya telah memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Namun demikian, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini akan dilakukan evaluasi secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Apabila diperlukan, akan dilakukan perubahan dan penyesuaian.

Semoga Renstra Deputi Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015 – 2019 ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Semoga Allah SWT. selalu memberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus bekerja dan berkarya dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bangsa khususnya di bidang kemaritiman.

Jakarta, 9 September 2016

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA,

AGUNG KUSWANDONO

DAFTAR ISI

		Halaman
	Kata Pengantar ……	i
	Daftar Isi ……	ii
	Daftar Gambar ……..	iii
	Daftar Tabel ……..	iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Kondisi Umum …….	1
	1.2 Potensi dan Permasalahan..……..	3
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
	2.1 Visi ……...	7
	2.2 Misi ……	8
	2.3 Tujuan ……..	8
	2.4 Sasaran Strategis ……...	9
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA	
	3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ……..……	13
	3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman…….	16
	3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa ……...	19
	3.4 Kerangka Regulasi …….	21
	3.5 Kerangka Kelembagaan ……	21
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
	4.1 Target Kinerja ……..	25
	4.2 Kerangka Pendanaan ……	29
BAB V	PENUTUP	31
Lampiran I	Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2015-2019 ……	32

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Empat Fokus Pembangunan Maritim Indonesia ……	3
Gambar 3.1	Fokus Tahapan RPJPN …….	13
Gambar 4.1	Jenis Keluaran Menurut Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman …….	25
Gambar 4.2	Alur Keluaran Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa ……...	27
Gambar 4.3	Tingkatan Keluaran Kebijakan Regulatif …….	28

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Produk Domestik Bruto Kelautan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2004-2013 ……	4
Tabel 2.1	Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa 2015 – 2019 ……..	11
Tabel 4.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019 ……	28
Tabel 4.2	Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019 …..	30

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini disajikan kondisi umum pengelolaan sumber daya alam kemaritiman berikut potensi dan permasalahannya. Bab ini juga menggambarkan posisi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa sebagai unit organisasi yang melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumber daya alam dan jasa yang sangat erat terkait dengan pembangunan bidang kemaritiman. Potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yang dipaparkan merupakan sisi yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis.

1.1 Kondisi Umum

Wilayah Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang luas lautnya mencapai 5,8 Juta km^2 (yang terdiri dari 3,1 juta km^2 perairan teritorial dan 2,7 juta km^2 perairan ZEE). Luas wilayah laut Indonesia mencapai lebih 70% dari seluruh wilayah Indonesia dan memiliki pulau sebanyak 17.504 (Dishidros, 2004). Secara geografis, negara kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera besar yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis di persilangan lalu lintas laut dunia. Posisi ini sangat strategis dan apabila dikelola dengan benar Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia sebagaimana visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Secara alamiah perairan Indonesia merupakan perlintasan utama sistem sirkulasi air panas dunia dan di dalamnya terjadi berbagai fenomena kelautan. Hal ini menjadikan perairan Indonesia berperan penting dalam sistem dan tata iklim dunia. Kondisi ini juga mengakibatkan perairan Indonesia kaya akan keanekaragaman dan kekayaan hayati. Sebagai contoh, perairan Indonesia kaya akan berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Tidak hanya itu, tatanan geologi wilayah Indonesia ini menjadikan wilayah Indonesia sangat subur dan kaya akan berbagai potensi sumber daya alam kebumian. Keindahan alam laut yang berupa hamparan pasir dan batu karang di pantai, deburan ombak, panorama pulau-pulau kecil dan pemandangan

bawah air serta keragaman budaya masyarakat pesisir merupakan potensi wisata bahari yang menjadi salah satu obyek tujuan wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Selain itu, lebih dari 60 persen dari 40 cekungan migas potensial yang dimiliki oleh Indonesia berada di lepas pantai.

Posisi strategis, potensi kekayaan alam dan kondisi ruang wilayah perairan Indonesia, apabila dikelola secara benar, dapat memberi manfaat banyak untuk pembangunan ekonomi dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun demikian, kondisi yang ada saat ini kegiatan bidang kelautan dan kemaritiman di Indonesia dilaksanakan di sejumlah kementerian dan lembaga. Disamping itu, meskipun sejumlah kementerian telah melaksanakan pembangunan bidang kemaritiman, belum semua urusan kelautan dan kemaritiman secara menyeluruh dapat dikerjakan dan masih terdapat sejumah urusan kemaritiman yang tertinggal. Oleh karena itu untuk memajukan bidang kemaritiman diperlukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik.

Pembangunan maritim sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dengan menetapkan target untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dibangun atas dasar lima pilar sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 November 2014 dalam *9th East Asia Summit*, di Myanmar, yakni:

1. Budaya maritim, bermaksud membangun kesadaran sebagai bangsa yang identitas, kemakmuran, dan masa depannya ditentukan oleh bagaimana mengelola samudera.
2. Ekonomi maritim, bermaksud menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut.
3. Infrastruktur dan konektivitas, bermaksud pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, melalui pembangunan tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
4. Diplomasi maritim, bermaksud membangun kerjasama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.
5. Keamanan maritim, bermaksud membangun kekuatan pertahanan maritim, menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, dan menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Sebagai langkah perwujudan target tersebut, maka dibentuklah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam kabinet kerja. Tugas utama kementerian

koordinator ini adalah mengefektifkan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan bidang kemaritiman sehingga terjadi sinergi diantara kementerian-kementerian yang dikoordinasikan untuk mengurangi dan atau menghilangkan hambatan-hambatan yang ada. Untuk mencapai Indonesia sebagai poros maritim dunia dilaksanakan pembangunan bidang kemaritiman dengan fokus kepada kedaulatan maritim, sumber daya alam dan jasa, infrastruktur kemaritiman dan sumber daya manusia, Iptek dan budaya maritim sebagaimana tersaji pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1

Empat Fokus Pembangunan Maritim Indonesia

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Fokus pembangunan maritim dijabarkan lebih lanjut dalam struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Khusus untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa, dibentuk unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Diharapkan dengan pembentukan unit organisasi ini akan menghilangkan hambatan dan kendala dalam pembangunan kemaritiman khususnya dalam hal peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan jasa kemaritiman.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Terkait dengan potensi dalam permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan jasa kemaritiman, sedikitnya ada tiga aspek yang harus menjadi perhatian dalam penetapan kebijakan dalam rangka pembangunan sektor kemaritiman. Pertama, aspek ekonomi. Ditinjau dari aspek ekonomi, peran sektor kemaritiman

dalam struktur perekonomian terbilang rendah bila dibandingkan dengan potensi kelautan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Menurut indikator kemaritiman yang sedang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Badan Pusat Statistik, terdapat 9 *cluster* kelautan Indonesia yaitu (1) perikanan; (2) energi dan sumber daya mineral; (3) industri bioteknologi; (4) industri maritim; (5) jasa maritim; (6) wisata bahari; (7) perhubungan laut; (8) bangunan laut; dan (9) pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut. Namun, dikarenakan ketidaktersediaan data hanya beberapa *cluster* saja yang dapat dianalisis kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Data BPS menunjukkan bahwa berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) Harga Berlaku periode 2004-2013, PDB perikanan rata-rata mencapai Rp 157.179,32 milyar per tahun, PDB pertambangan minyak dan gas rata-rata mencapai Rp 271.695,55 milyar per tahun, PDB pengilangan minyak bumi rata-rata mencapai Rp 119.458,68 milyar per tahun, PDB Gas Alam Cair (LNG) rata-rata mencapai Rp 82.901,10 milyar per tahun, PDB angkutan laut rata-rata mencapai Rp 16.712,19 milyar per tahun, dan PDB angkutan sungai, danau dan penyeberangan rata-rata mencapai Rp 6.204,10 milyar per tahun. Secara lengkap perkembangan PDB kelautan menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Produk Domestik Bruto Kelautan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2004-2013

Lapangan Usaha	2004	2008	2011	2012*	2013**
Perikanan	53,010.80	137,249.50	226,691.00	255,367.50	291,799.10
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	118,484.90	283,283.30	370,222.90	386,560.20	401,139.10
Pengilangan Minyak Bumi	59,062.00	145,942.60	131,482.30	130,273.60	144,559.80
Gas Alam Cair (LNG)	35,201.40	91,829.00	121,596.30	124,283.10	122,233.80
Angkutan Laut	12,328.30	16,019.20	18,589.90	19,661.80	21,656.30
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	3,233.00	5,570.30	7,646.20	8,765.70	10,675.90
PDB Nasional	**2,295,826.20**	**4,948,688.40**	**7,419,187.10**	**8,229,439.40**	**9,083,972.20**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014
Keterangan : * Angka Sementara,
** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa rata-rata kontribusi perikanan terhadap total PDB nasional baru mencapai 2,75 persen, pertambangan minyak dan

gas bumi mencapai 5,24 persen, pengilangan minyak bumi mencapai 2,46 persen, gas alam cair (LNG) mencapai 1,56 persen, angkutan laut mencapai 0,35 persen dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan mencapai 0,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor dalam bidang kemaritiman kurang dapat tumbuh secara optimal.

Kedua, aspek ekologi. Indonesia mengalami kesulitan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut dan *marine mega biodiversity*-nya. Indonesia memiliki lebih dari 80,000 km persegi daerah terumbu karang atau sekitar 14 persen terumbu karang dunia. Bersama Phillipina dan Papua New Guinea, wilayah Indonesia merupakan wilayah prioritas untuk memelihara kelestarian *marine biodiversity* di Asia-Pasifik yang dikenal sebagai "*Coral Triangle*" dikarenakan 35% wilayah terumbu karang dunia berada di wilayah ini. Selain itu, di Indonesia terdapat pula hutan bakau seluas 2,5 juta hektar yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hutan bakau antara lain berfungsi sebagai daerah pembiakan, pembesaran dan mencari makan bagi ikan, udang dan organisme laut lain, serta melindungi pantai dari abrasi dan erosi.

Dalam kenyataannya, Indonesia juga mengalami degradasi lingkungan laut yang sangat serius dan mengancam kelangsungan kehidupan *mega biodiversity* di Asia-Pasifik. Dalam 50 tahun terakhir, kerusakan terumbu karang meningkat dari sekitar 10% menjadi 50%. Hutan bakau di Indonesia juga berkurang dengan cepat karena pembangunan fasilitas pantai dan tambak liar. Tanpa upaya yang cepat dan serius maka seluruh terumbu karang Indonesia akan lenyap dalam 20 sampai 40 tahun. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan industri perikanan dan kelautan serta wisata bahari di Indonesia apabila keadaan ini tidak segera ditangani dengan baik. Penyebab utama kerusakan karang dan lingkungan laut adalah penangkapan ikan yang merusak, pengembangan wilayah pantai yang tidak terkendali dan sedimentasi serta polusi. Cukup jelas bahwa pembangunan kelautan harus dilaksanakan secara berkelanjutan *(sustainable)*.

Ketiga, aspek kebencanaan maritim. Wilayah Indonesia secara geografis terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, di bagian selatan dan timur terdapat sabuk vulkanik *(volcanic arc)* yang memanjang dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Kondisi ini memiliki potensi bencana yang tinggi, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Indonesia sebagai bagian dari rangkaian 'cincin api' Pasifik atau 'lingkaran api' Pasifik

merupakan daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung. Cakupan wilayah cincin api ini sepanjang 40.000 km dengan bentuk seperti tapal kuda. Akibatnya adalah 81 persen gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang wilayah ini. Daerah gempa berikutnya (5–6 persen dari seluruh gempa dan 17 persen dari gempa terbesar) adalah sabuk Alpide yang membentang dari Jawa, Sumatera, Himalaya, Mediterania hingga Atlantika.

Berada di wilayah dengan potensi bencana sangat dahsyat membuat Indonesia harus memiliki sistem manajemen bencana terpadu dan terintegrasi untuk meminimalisasi dampak dari risiko yang ditimbulkan, mencakup hubungan antara komponen-komponen ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kemampuan dalam mengelola ancaman. Upaya-upaya dalam manajemen bencana berfungsi untuk menyeleraskan fungsi kehidupan manusia agar bisa hidup berdampingan dengan bencana yang kerap kali terjadi tanpa bisa diprediksi. Dalam siklus manajemen bencana manusia belajar bagaimana mengenali dan memahami bencana, bagaimana cara meminimalisir risiko sebelum terjadinya bencana, pada saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana.

Ketiga aspek sebagaimana dipaparkan di atas harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan kemaritiman khususnya tentang pengelolaan sumber daya alam dan jasa. Ketiga aspek tersebut saling terkait dan membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi sehingga tidak tumpang tindih baik dalam formulasi maupun dalam pelaksanaannya. Selain itu, perlu pula dipastikan agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik melalui upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait pengelolaan aspek ekonomi, ekologi dan kebencanaan maritim.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai fungsi untuk memastikan formulasi dan implementasi kebijakan ekonomi, ekologi dan kebencanaan maritim terlaksana dengan optimal. Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan sumber daya hayati, sumber daya mineral, energi dan non konvensional, jasa kemaritiman serta lingkungan dan bencana maritim.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Bab ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategisDeputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2015-2019.Visi, misi, dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, sebagaimana tersebut dalam rencana strategis kementerian,serta kondisi umum, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi lima tahun kedepan merupakan dasar pertimbangan dalam perumusan visi, misi, dan tujuan unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam mengupayakan terwujudnya peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan jasa secara optimal.

2.1 Visi

Dalam mengemban tugas dan fungsi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa mempunyai visi **terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.**

Visi ini merupakan rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam rangka memberikan dukungan terhadap tujuan kementerian. Visitersebut mempunyai makna bahwa koordinasi dan sinkronisasi di bidang peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam dan jasa merupakan proses menyatukan pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Disisi lain, pengendalian merupakan proses pemantauan kegiatan untuk memastikan kesesuaian rencana yang dilakukan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Fungsi ini diperlukan untuk mewujudkan tujuanunit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yang dilakukan melaluipenerapan nilai-nilai dasar unit organisasi yakni efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Efektif memberikan arti bahwa kinerja hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalianharus memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya pencapaian peningkatanpengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam dan jasa.Efisien menjelaskan bahwakegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dilakukan dengan menggunakan sumber daya secara cermat, akurat dan optimal

serta mengacu kepada kebutuhan organisasi. Selanjutnya, transparan dan akuntabel berarti adanya kewajiban pelaporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kepada pihak terkait yang dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan keterbukaan. Berkelanjutan mempunyai makna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif agar tercipta sinergi antara para pemangku kepentingan sehingga tercipta pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang berkesinambungan.

2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata yang sesuai dengan peran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa. Misi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa untuk mewujudkan visinya adalah:

1. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan jasa lintas Kementerian/ Lembaga.
2. Melaksanakan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa secara berkelanjutan.
3. Mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumber daya alam dan jasa.

2.3 Tujuan

Secara umum tujuan unit organisasi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa adalah untuk mewujudkan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa kemaritiman yang berkelanjutan melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa. Secara khusus, tujuan organisasi dengan memedomani visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Memastikan agar proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan jasa telah dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat umum dalam pengambilan kebijakan.

2. Memastikan agar proses perumusan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa selalu didukung dengan data dan informasi lintas Kementerian/ Lembaga yang akurat.
3. Memaksimalkan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan jasa kemaritiman.
4. Memastikan agar pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumber daya alam dan jasa didukung dengan administrasi kegiatan dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan ditopang oleh sumber daya manusia berbasis kompetensi dan integritas tinggi yang berkomitmen terhadap pelaksanaan tugas, prosedur administrasi yang sederhana, struktur organisasi yang efektif dan efisien serta akuntabilitas kinerja yang baik.

Tujuan tersebut di atas dapat dicapai apabila pelaksana kebijakan/program sektor/lintas sektor di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa mempunyai komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kinerjanya secara optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dapat diwujudkan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan sasaran pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang efektif dan berkelanjutan dapat tercapai.

Tujuan unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (periode 2015-2019) dan merupakan bagian integral dari tujuan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi potensi dan permasalahan, dan tantangan yang dihadapi organisasi ke depan.

2.4 Sasaran Strategis

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memenuhi harapan *stakeholder*, unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa menyusun Sasaran Strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa.

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa.

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dapat dirangkum dan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa 2015-2019

Visi: Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Misi 1 : "Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan jasa lintas Kementerian/ Lembaga."				
- Memastikan agar proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan jasa telah dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat umum dalam pengambilan kebijakan. - Memastikan agar proses perumusan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa kemaritiman selalu didukung dengan data dan informasi lintas Kementerian/ Lembaga yang akurat.	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang didukung dengan data dan informasi lintas Kementerian/ Lembaga yang akurat.	- Pengembangan jejaring, kerjasama, sinergi dan komunikasi antar sektor dan Kementerian/ Lembaga terkait. - Mengkoordinasikan dan mengumpulkan data dan informasi lintas Kementerian/ Lembaga.	- Menyiapkan bahan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa kemaritiman dengan menyusun database/ *dashboard* sumber daya alam dan jasa kemaritiman. - Mengembangkan kerjasama antar Kementerian/ Lembaga terkait dalam bidang pengelolaan sumber daya hayati, sumber daya mineral, energi dan non konvensional, jasa kemaritiman dan kebijakan lingkungan dan kebencanaan maritim.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa
Misi 2 : "Melaksanakan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa secara berkelanjutan".				

Memaksimalkan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan jasa kemaritiman.	Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa secara berkelanjutan	- Fokus pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa kemaritiman; - Monitoring dan evaluasi dilikuti dengan pelaporan kinerja yang memiliki karakteristik simpel, akurat dan cepat sehingga dapat menggambarkan pencapaian pelaksanaan kebijakan beserta tantangan dan hambatannya.	- Mengembangkan SOP monitoring dan evaluasi. - Mengembangkan sistem pelaporan monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi.	Program Pengendalian Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa
Misi 3 : "Mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumber daya alam dan jasa."					
Memastikan agar pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumber daya alam dan jasa didukung dengan administrasi kegiatan dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan ditopang oleh sumber daya manusia berbasis kompetensi dan integritas tinggi yang berkomitmen terhadap pelaksanaan tugas, prosedur administrasi yang sederhana, struktur organisasi yang efektif dan efisien serta akuntabilitas kinerja yang baik.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.	- Merencanakan pengembangan organisasi; - Menyusun budaya dan nilai-nilai organisasi; - Meningkatkan produktivitas karyawan dan kualitas kerja; - Meningkatkan komitmen karyawan sehingga dapat memotivasi kinerja yang baik. - Meningkatkan tata kelola administrasi umum dan keuangan; - Meningkatkan akuntabilitas pelaporan.	- Menyusun arah pengembangan organisasi; - Mendefinisikan, mengembangkan dan menginternalisasi budaya organisasi; - Membangun kompetensi berbasis visi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa; - Menyusun SOP dan sistem administasi umum, kepegawaian dan keuangan; - Menyusun SOP pelaporan.	Program Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

Bab ini menyajikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi serta kerangka regulasi dan kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Arah kebijakan dan strategi tersebut merupakan turunan dari arah kebijakan dan strategi nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 memiliki tahapan pelaksanaan setiap lima tahun. Tahun 2015 – 2019 adalah Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dalam tahapan RPJMN ketiga ini adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek. Gambar berikut memperlihatkan tahapan RPJPN secara menyeluruh.

Gambar 3.1
Fokus Tahapan RPJPN

Sumber: Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 hal. 79-80.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, misi RPJPN 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong

kerja sama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

Selain itu, dengan terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI masa bakti 2015-2019, telah disusun prioritas nasional berdasarkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang secara formal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.

Visi Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kala untuk periode lima tahun kedepan (2015-2019) adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA BERDAULAT, MANDIRI, DANBERKEPRIBADIAN BERDASARKAN GOTONG ROYONG

Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 7 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan demikian, tujuan nasional bidang kemaritiman untuk masa lima tahun ke depan (2015-2029) difokuskan pada upaya mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dirumuskan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Berdasarkan rencana strategis Kementerian, maka arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

untuk jangka waktu lima tahun kedepan (2015-2019) akan diimplementasikan melalui aktualisasi empat fokus koordinasi di bidang kemaritiman yakni:

1. Memperkuat kedaulatan maritim;
2. Memperkuat sumber daya manusia, Iptek dan budaya maritim;
3. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan jasa yang berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim.

Dari empat fokus koordinasi bidang kemaritiman tersebut yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa adalah fokus koordinasi ketiga yakni meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan jasa yang berkelanjutan. Untuk mempercepat terjadinya sinergi di bidang kemaritiman dalam rangka peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam serta jasa kemaritiman yang berkelanjutan dan berdaya saing global, maka arah kebijakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumber daya alam dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan nilai tambah sumber daya hayati laut yang berkelanjutan serta melestarikan keanekaragaman hayati laut menggunakan pertimbangan ilmiah berdasarkan data, informasi dan pengetahuan terkini yang tersedia;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan nilai tambah sumber daya mineral serta mendorong percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi konvensional untuk mendukung kedaulatan energi nasional;
3. Meningkatkan kegiatan eksplorasi energi konvensional dan non konvensional serta pemanfaatan sumberdaya non konvensional secara luas;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan jasa transportasi dan kepelabuhan yang berstandar internasional;
5. Mendorong peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara melalui peningkatan promosi, pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, penyederhanaan perijinan, dan memberikan kemudahan investasi wisata;
6. Melestarikan kearifan lokal, budaya bahari, dan lingkungan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata dalam mengembangkan jasa pariwisata;
7. Mendorong penerapan tata ruang terpadu dengan memandang daratan dan perairan sebagai satu kesatuan;

8. Mendorong terwujudnya lingkungan pesisir dan perairan yang bersih, sehat dan produktif untuk pelaksanaan pembangunan maritim yang berkelanjutan dan menjamin terciptanya kondisi lingkungan yang nyaman dan aman bagi masyarakat;
9. Meningkatkan upaya mitigasi dalam pengelolaan kebencanaan maritim untuk mengurangi resiko dan memperkecil dampak.

Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan empat fokus koordinasi bidang kemaritiman diperlukan penataan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui implementasi *best-practices* tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang cermat, akurat dan akuntabel;
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dalam pencapaian target pembangunan;
3. Mendorong perluasan bidang kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam maupun luar negeri;
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal;
5. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal;
6. Meningkatkan kualitas kegiatan kehumasan untuk mendapatkan dukungan dari seluruh *stakeholders* dan *shareholders* dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
7. Meningkatkan kualitas produk hukum dan meningkatkan tata kerja organisasi yang efektif dan efisien;
8. Meningkatkan kualitas penyelenggaran persidangan dalam berbagai level;
9. Meningkatkan pengelolaan tata usaha dan protokol untuk mendukung kegiatan pimpinan;
10. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang bersih dan tertib administrasi;
11. Meningkatkan kualitas pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan-kebijakan di atas dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, maka strategi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

khususnya yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dilaksanakan melalui :

1. Penetapan pengembangan sumber daya alam dan jasa secara berkelanjutan sebagai salah satu dari empat fokus pembangunan kemaritiman.
2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dilaksanaan melalui berbagai rapat koordinasi, forum dan media sosialisasi guna mencapai:
   a. Pemantapan sinergi dan keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan kemaritiman;
   b. Peningkatan komitmen untuk mencapai target-target yang ditetapkan.
3. Perluasan cakupan koordinasi selain K/L dalam lingkup koordinasi kemaritiman, antara lain mencakup K/L terkait lainnya, sektor swasta, kelembagaan masyarakat, tokoh masyarakat, badan-badan internasional, dan masyarakat umum lainnya sepanjang menyangkut isu kemaritiman.
4. Perluasan pelaksanaan koordinasi hingga ke tingkat Kabupaten/Kota, dan jika dibutuhkan sampai level lebih rendah, guna menjamin pelaksanaan kebijakan pembangunan kemaritiman di daerah.
5. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan kemaritiman, melalui :
   a. Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan kemaritiman di lapangan;
   b. Kajian dan penilaian hasil pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan kebijakan.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Kebijakan prioritas Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam dan jasa yang berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dengan memedomani Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah:

1. Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa.
2. Mewujudkan pengendalian kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan prioritas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa melaksanakan strategi yang sejatinya merupakan langkah-langkah Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

untuk mendorong peningkatan kinerja sektor/lintas sektor terkait pengelolaan sumber daya alam dan jasa kemaritiman menjadi lebih optimal, efektif, dan efisien. Meningkatnya kinerja pengelolaan sektor/lintas sektor dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan terwujudnya sasaran pembangunan ekonomi khususnya bidang kemaritiman yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana tertuang pada RPJMN 2015-2019.

Strategi yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa kemaritiman, adalah sebagai berikut:

1. Mendahulukan penanganan terhadap prioritas kegiatan yang tercantum dalam prioritas nasional/ Nawacita.
2. Mengedepankan kepentingan yang berdampak pada masyarakat luas dalam pengambilan keputusan dalam koordinasi dan sinkronisasi.
3. Mengantisipasi potensi penyimpangan atas realisasi kegiatan yang targetnya telah disepakati antar Kementerian/Lembaga.

Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, maka program kerja dan kegiatan ditekankan pada:

1. Peningkatan koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian kebijakan sumber daya hayati;
2. Peningkatan koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian kebijakan sumber daya mineral, energi, dan non konvensional;
3. Peningkatan koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian kebijakan jasa kemaritiman;
4. Peningkatan koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian kebijakan lingkungan dan kebencanaan maritim.

Selanjutnya untuk melaksanakan kebijakan strategis tersebut diperlukan pula dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam bentuk layanan kesekretariatan (program, tata usaha dan pelaporan) yang menitikberatkan kepada:

1. SDM berbasis kompetensi;
2. Struktur organisasi efektif dan efisien;
3. Sistem informasi yang terintegrasi dan ketersediaan data / informasi yang akurat, komprehensif, dan terkini;
4. Akuntabilitas kinerja yang baik.

3.4 Kerangka Regulasi

Dalam rangka koordinasi kebijakan pengembangan dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan jasa secara berkelanjutan maka perlu dibangun kerangka regulasi dalam tahun 2015-2019. Kerangka regulasi yang perlu dibangun secara umum merupakan penjabaran/amanat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun peraturan lain yang diperlukan dalam operasional/implementasi kebijakan. Berbagai regulasi yang tumpang tindih dari berbagai sektor untuk mengatur hal sama juga perlu diselaraskan, terutama yang terkait dengan penyederhanaan perizinan sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya dalam pengurusannya sehingga dapat meningkatkan daya saing. Selain itu, berbagai kebijakan yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika pembangunan maupun kondisi yang sedang berkembang perlu diperbaiki sehingga adaptif terhadap kondisi saat ini dan masa mendatang. Yang paling utama adalah keberpihakan regulasi tersebut kepada kepentingan bangsa, negara dan pembangunan nasional khususnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat

3.5 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka antisipasi penyesuaian terhadap perubahan lingkungan organisasi yang terus berkembang dengan cepat dan dinamis, maka setiap organisasi khususnya birokrasi pemerintah dituntut untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengelolaan sumber daya organisasi harus dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka mewujudkan:

1. Organisasi yang bersih dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas sinkronisasi dan koordinasi kebijakan.
3. Peningkatan kualitas pengendalian kebijakan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap para pemangku kepentingan.

Permasalahan dan tantangan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa kemaritiman yang komplek saat ini dapat ditangani dengan lebih baik, apabila seluruh jajaran pegawai yang terkait dan terlibat langsung mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal melalui koordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan. Hal inilah peran penting tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Dalam menghadapi situasi permasalahan di bidang perekonomian nasional yang senantiasa berkembang dan cepat berubah, deputi dituntut untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa lintas kementerian/lembaga. Dengan kemampuan kinerja organisasi, maka banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul lintas sektoral dapat segera dikelola dengan baik dengan melaksanakan konsep sistem manajemen kinerja berbasis strategis secara disiplin.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Pasal 4, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kementerian Perhubungan;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Kementerian Pariwisata; dan
5. Instansi lain yang dianggap perlu.

Meskipun demikian, kegiatan kemaritiman tidak hanya terbatas pada empat Kementerian di atas, tetapi menyebar lebih luas di hampir seluruh Kementerian/Lembaga. Menurut berbagai sumber urusan kemaritiman saat ini ditangani oleh lebih dari 14 Kementerian dan Lembaga Negara.

Khusus untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, maka kerangka hubungan kelembagaan yang harus mendapatkan perhatian dan ditingkatkan antara lain adalah:

1. Koordinasi mengenai perumusan kebijakan perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan produk perikanan, pemberantasan *IUU Fishing*, perumusan kebijakan turunan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, fasilitasi Komite Nasional *ICT* dan tata niaga garam dilakukan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BUMN/ BUMD maupun dengan Lembaga Asing, Universitas dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
2. Untuk pelaksanaan koordinasi bidang jasa kemaritiman, perlu ditingkatkan koordinasi dengan Instansi seperti Ditjen Bea Cukai dan Kementerian Perhubungan.
3. Dalam pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, perlu dibangun sinergi dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang memiliki lokasi kawasan pariwisata tersebut berada. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing, perlu pula koordinasi dan sosialisasi Bebas Visa Kunjungan dan *Yachters* dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Imigrasi.
4. Terkait dengan penguatan ketahanan energi untuk mendukung kedaulatan energi perlu koordinasi yang baik, terutama terkait peran badan usaha baik BUMN/BUMD dan swasta serta Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Kementerian BUMN, BPH Migas, dan Pemerintah Daerah yang menjadi pelaksana kunci dalam peningkatan pasokan energi primer dan infrastrukturnya. Perlu pula dipastikan koordinasi yang baik dalam hal energi terbarukan dan sumber daya mineral.
5. Dalam hal kebencanaan dan aspek lingkungan kemaritiman, sinergi perlu dibangun dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan para pemangku kepentingan lainnya.

Organisasi yang mampu bertahan di masa depan adalah organisasi yang melakukan proses pembelajaran *(learning)* dengan baik. Dalam proses pembelajaran organisasi perlu mengevaluasi berbagai aspek dalam kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Salah satu hal yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu meningkatkan kapasitas kinerja dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sesuai dengan nilai-nilai kedeputian dan kementerian. Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi *(right size and right function).* Dengan organisasi yang ideal, diarahkan menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan. Upaya untuk membentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dalam menjalankan operasional organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi akan dapat berjalan dengan lancar bila mendapat dukungan sarana dan prasarana sebagai infrastruktur kerja yang memadai.

Dalam rangka membangun organisasi yang efektif dan efisien, maka tahap selanjutnya perlu dilakukan adalah evaluasi organisasi sesuai perubahan lingkungan strategis agar diperoleh keseimbangan beban kerja yang proporsional antara tugas dan fungsi, jabatan struktural dan output yang dihasilkan. Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) diperlukan sebagai masukan untuk evaluasi dan penataan struktur organisasi yang efektif dan efisien.

Terkait dengan penataan proses bisnis dilakukan melalui kegiatan penyusunan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dan pembangunan atau pengembangan *e-government*. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah memiliki proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam SOP. Dari aspek pengembangan *e-government*, inovasi dan dukungan sistem informasi selalu terus dikembangkan dan infrastruktur informasi yang ada telah cukup memadai. Implementasi kebijakan yang telah dilakukan yaitu melalui upaya pengembangan *e-government*, antara lain berupa *dashboard* sistem informasi kemaritiman. Keberadaan *dashboard* dan sistem informasi kemaritiman berfungsi untuk memastikan agar proses perumusan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa kemaritiman selalu didukung dengan data dan informasi lintas Kementerian/ Lembaga yang akurat dan *scientific.*

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

Bab ini menjelaskan mengenai target kinerja yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Target kinerja tersebut juga dilengkapi dangan kerangka pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kinerja.

4.1 Target Kinerja

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman disebutkan bahwa tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman. Selanjutnya pada level eselon I, terdapat dua tugas utama. Tugas utama pertama adalah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang terdiri dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan kemaritiman. Hasil kinerja utama dari koordinasi dan sinkronisasi adalah rumusan kebijakan dan perbaikan kebijakan. Tugas utama kedua adalah pengendalian pelaksanaan kebijakan. Pengendalian adalah proses membandingkan kesesuaian dengan rencana atau proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Hasil kinerja utama dari pengendalian adalah rekomendasi tindakan.

Gambar 4.1
Jenis Keluaran Menurut Kegiatan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Keterangan : * dapat berupa penugasan khusus

Selain tugas utama, deputi dapat pula melaksanakan tugas lainnya yang berupa penugasan khusus baik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman maupun dari Presiden sebagai tindak lanjut sidang kabinet. Gambar 4.1 menjelaskan jenis keluaran menurut kegiatan yang terlaksana baik di level Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman maupun pada level eselon I.

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa diukur dari pencapaian sasaran strategis atau *outcome* program yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang pengelolaan sumber daya hayati, sumber daya mineral, energi, dan non konvensional, jasa kemaritiman, pengelolaan lingkungan dan kebencanaan maritim secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya keluaran-keluaran *(outputs)* yang disampaikan oleh unit eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Target kinerja yang ditetapkan unit eselon I merupakan identifikasi dan analisis kebutuhan pelanggan *(customers)* baik dari segi jumlah maupun jenis keluaran hasilnya *(outcome).* Untuk mewujudkan hasil *(outcome)* dimaksud, unit eselon I menugaskan unit eselon II sebagai penanggung jawab pelaksana pembuatan keluaran *(output).* Unit eselon II mengupayakan pembuatan keluaran tersebut dengan menentukan tahapan proses kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Gambar 4.2 menjelaskan mengenai alur keluaran kegiatan pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa mulai level bidang sampai level pemerintah dan Kementerian/ Lembaga. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa dimulai dari unit eselon III (bidang). Unit ini berfungsi untuk menghimpun bahan kebijakan. Bahan kebijakan ini selanjutnya diolah, dianalisis, dan dirumuskan menjadi rumusan kebijakan pada level unit eselon II (asisten deputi). Rumusan kebijakan yang dihasilkan tersebut dipilah dan disusun menjadi rekomendasi kebijakan deputi. Rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan oleh deputi, selanjutnya dibawa ke level Menteri Koordinator. Pada level ini, rekomendasi tersebut ditetapkan menjadi kebijakan atau program Kementerian Koordinator atau menjadi rekomendasi Menteri Koordinator untuk menjadi kebijakan dan program pemerintah dan atau Kementerian/ Lembaga.

Gambar 4.2
Alur Keluaran Kegiatan
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Output kebijakan dapat berupa kebijakan regulatif yang berarti dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Keluaran kebijakan regulatif dapat dibagi menjadi lima tingkatan sebagai berikut:

1. Kebijakan internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kebijakan ini berbentuk Keputusan atau Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
2. Kebijakan Kementerian/ Lembaga terkait, yakni berupa Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur dan sebagainya.
3. Kebijakan Presiden, yakni berupa Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan atau Instruksi Presiden.
4. Kebijakan nasional, yakni berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
5. Kebijakan pada level regional dan internasional, yakni berupa konvensi, resolusi dan perjanjian internasional.

Tingkatan keluaran kebijakan regulatif tersaji pada gambar 4.2 berikut.

Gambar 4.3
Tingkatan Keluaran Kebijakan Regulatif

Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Berdasarkan kepada alur keluaran dan tingkatan keluaran kebijakan regulatif sebagaimana telah dipaparkan serta dengan berpedoman kepada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa selama periode 2015-2019 yang telah diuraikan pada Bab II, maka dapat disusun indikator kinerja dan target yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Sasaran strategis dan indikator kinerja berikut target selama lima tahun ke depan disajikan pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis/ Indikator	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Strategis (Outcome) 1 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Indikator					
1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang diselesaikan;	8	8	8	8	8
2. Persentase rekomendasi/ rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti	80 %	80 %	80 %	85 %	90 %
Sasaran Strategis (Outcome) 2 Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa Indikator					
1. Jumlah pengendalian implementasi kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa	3	3	3	3	3
2. Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa yang ditindaklanjuti.	70 %	70 %	80 %	85 %	90 %
Sasaran Strategis (Outcome) 3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Indikator					
1. Jumlah dokumen tentang perencanaan program dan anggaran, laporan kinerja serta teknis pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.	1	1	1	1	1
2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran serta teknis pada Deputi Bidang Koordinasi Sumbern Daya Alam dan Jasa.	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %
3. Jumlah dokumen bidang tata usaha dan pelaporan.	1	1	1	1	1
4. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian, penyelesaian layanan urusan keuangan, penyelesaian layanan tata naskah, arsip dan dokumentasi, laporan keuangan, dan tindak lanjut LHP.	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah rencana alokasi anggaran yang dibutuhkan selama lima tahun dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran srategis serta target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, program teknis dinamakan “Penyelenggaraan Koordinasi Kebijakan Sumberdaya Alam dan Jasa”. Sedangkan untuk nomenklatur kegiatan disesuaikan dengan unit Eselon II terkait, yakni:

1. Koordinasi kebijakan sumberdaya hayati;
2. Koordinasi kebijakan sumber daya mineral, energi, dan non konvensional;
3. Koordinasi kebijakan jasa kemaritiman;
4. Koordinasi kebijakan lingkungan dan kebencanaan maritim;
5. Penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Deputi Bidang Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, terdiri dari 5 unit Eselon II sehingga kegiatan dibagi dalam 5 nomenklatur. Nomenklatur kelima yakni pelayanan kesekretariatan Deputi merupakan kegiatan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam bentuk layanan kesekretariatan (program, tata usaha dan pelaporan). Kerangka pengeluaran jangka menengah Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa 2015-2019 untuk tiap kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman disajikan pada table 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Kerangka Pendanaan
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019

Program	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2015	2016	2017	2018	2019	
Penyelenggaraan Koordinasi Kebijakan Sumberdaya Alam dan Jasa	-	18.00	40.3	53.9	68.5	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2015-2019

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Deputi Bidang Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yang disusun selaras dengan RPJMN Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Dokumen Renstra Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019 telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 (lima) tahun, beserta arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai rencana yang telah ditetapkan. Rencana program dan kegiatan tahun 2015-2019 tersebut disusun dengan memperhatikan kondisi kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki setiap unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan sumber pendanaannya, serta komitmen semua pimpinan dan staf Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Oleh karena itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, akan dilakukan evaluasi secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Apabila diperlukan, akan dilakukan perubahan.

Dengan tersusunnya Renstra Kedeputian Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019 ini, diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, sehingga dapat memaksimalkan peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang pembangunan kemaritiman.

LAMPIRAN I
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2015-2019
UNIT ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

No.	Program/ Kegiatan/ Tujuan/ Indikator	Target (Kebijakan/ Dokumen/ Persentase)					Alokasi (Dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Koordinasi sumber daya hayati Indikator Kinerja 1. Jumlah bahan kebijakan dan/ atau regulasi bidang sumber daya hayati yang dihasilkan; 2. Jumlah rekomendasi kebijakan sumber daya hayati yang menjadi rekomendasi Deputi.	6 3	6 3	6 3	6 3	6 3		6.001,52	7.300	8.665	9.098,3	Asdep Sumber Daya Hayati
2.	Koordinasi sumber daya mineral, energi dan non konvensional Indikator Kinerja 1. Jumlah bahan kebijakan dan/ atau regulasi bidang sumber daya mineral, energi dan non konvensional yang dihasilkan; 2. Jumlah rekomendasi kebijakan sumber daya mineral, energi dan non konvensional yang menjadi rekomendasi Deputi.	6 3	6 3	6 3	6 3	6 3		6.618,75	10.400	8.665	11.466	Asdep Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional
3.	Koordinasi sumber daya jasa kemaritiman Indikator Kinerja 1. Jumlah bahan kebijakan dan/ atau regulasi bidang jasa kemaritiman yang dihasilkan; 2. Jumlah rekomendasi kebijakan jasa kemaritiman yang menjadi rekomendasi Deputi.	6 3	6 3	6 3	6 3	6 3		6.994,17	9.700	10.185	9.642,2	Asdep Jasa Kemaritiman
4.	Koordinasi lingkungan dan kebencanaan maritim Indikator Kinerja 1. Jumlah bahan kebijakan dan/ atau regulasi bidang lingkungan dan kebencanaan maritim yang dihasilkan; 2. Jumlah rekomendasi kebijakan lingkungan dan kebencanaan maritim yang menjadi rekomendasi Deputi.	6 3	6 3	6 3	6 3	6 3		6.968,73	5.600	7.880	8.274	Asdep Lingkungan dan Kebencanaan Maritim
5.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa Indikator Kinerja 1. Jumlah dokumen tentang perencanaan program dan anggaran, laporan kinerja serta teknis pada Deputi Bidang Koordinasi Sumbern Daya Alam dan Jasa. 2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran serta teknis pada Deputi Bidang Koordinasi Sumbern Daya Alam dan Jasa.	1 80 %	1 80 %	1 90 %	1 100 %	1 100 %		6.840,04	7.000	7.350	7.717,5	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

	3. Jumlah dokumen bidang tata usaha dan pelaporan. 4. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian, penyelesaian layanan urusan keuangan, penyelesaian layanan tata naskah, arsip dan dokumentasi, laporan keuangan, dan tindak lanjut LHP.	1 80 %	1 80 %	1 90 %	1 100 %	1 100 %						

Keterangan : Khusus untuk Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa target kinerja dalam bentuk dokumen, sedangkan untuk Asdep-Asdep berbentuk kebijakan.